

KOLABORASI ANTARLEMBAGA DALAM PENGUATAN KETAHANAN SOSIAL: STUDI TNI DAN PEMERINTAH DAERAH DI DISTRIK TEMINABUAN

Nimbort Duwit¹, Lukman Rais^{2*}, Nur Hidayah³, Andi Mardaya⁴

^{1,2,3}Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

⁴Program Studi Kriminologi, FH, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia

*Korespondensi: lukmanrais28@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.33506/pjs.v3i2.5419>

Abstract

This study aims to describe and analyze the forms of cooperation between the TNI and local government in efforts to enhance social resilience in Teminabuan District. The research employed a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, with informants purposively selected from the TNI, local government officials, and community leaders. The data were analyzed inductively using the interactive analysis model developed by Miles and Huberman. The findings indicate that collaboration between the TNI and local government is implemented through various initiatives, including infrastructure development programs, social service provision, local potential-based economic empowerment, and the strengthening of social relations grounded in local cultural values. This cooperation plays a significant role in enhancing social stability and strengthening community capacity to cope with social vulnerabilities. Nevertheless, the collaboration faces several challenges, such as budget constraints, slow bureaucratic processes, and resistance from segments of the community. The study concludes that synergy between the TNI and local government constitutes a strategic approach to strengthening community social resilience, particularly when supported by sustained coordination and active community participation.

Keywords: Collaboration; Resilience; Vulnerability; Cooperation; Indonesian National Armed Forces (TNI); Local Government

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bentuk kerja sama antara TNI dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial di Distrik Teminabuan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen, dengan informan yang ditentukan secara purposive dari unsur TNI, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat. Data dianalisis secara induktif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah diwujudkan dalam berbagai program pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, serta penguatan hubungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai budaya setempat. Kerja sama ini berperan penting dalam meningkatkan stabilitas sosial dan memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai kerentanan sosial. Meskipun demikian, pelaksanaan kolaborasi masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan anggaran, proses birokrasi yang lambat, serta adanya resistensi dari sebagian masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara TNI dan pemerintah daerah merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat, terutama apabila didukung oleh koordinasi yang berkelanjutan dan keterlibatan aktif masyarakat.

Kata Kunci: Kolaborasi; Ketahanan; Kerentanan; Kerja Sama; TNI; Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Ketahanan sosial merupakan unsur penting dalam menjaga stabilitas, kohesi, dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah

yang memiliki tantangan geografis dan sosial yang kompleks. Ketahanan sosial menggambarkan kemampuan kolektif masyarakat untuk bertahan, menyesuaikan

diri, serta pulih dari tekanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan sosial (Ramli et al., 2023; Ramli, Hasbi, & Basri, 2022).

Dalam perspektif sosiologi pembangunan, ketahanan sosial dipahami sebagai prasyarat utama bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan stabilitas sosial di tingkat lokal. Ketahanan sosial tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan politik, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat dalam mengelola konflik, menjaga solidaritas sosial, serta mempertahankan jaringan sosial di tengah dinamika perubahan sosial yang cepat (Ramli, Hasbi, & Ramli, 2022).

Di Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran strategis yang tidak terbatas pada fungsi pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sosial masyarakat melalui pembinaan teritorial. Program seperti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) menunjukkan keterlibatan aktif TNI dalam pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan stabilitas sosial, khususnya di wilayah terpencil dan rawan konflik (Bustanil et al., 2022; Manoppo et al., 2021).

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal juga memiliki tanggung jawab besar dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui perumusan kebijakan publik, penyediaan layanan sosial, serta pelaksanaan program pembangunan sosial yang

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (Asih & Kurniawan, 2024; Martina Marwanti et al., 2017).

Kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam memperkuat ketahanan sosial, terutama di wilayah dengan tingkat kerentanan sosial yang tinggi. Melalui sinergi antar lembaga, perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan (Andayani et al., 2021; Djuyandi et al., 2023; Kusendarto et al., 2025).

Distrik Teminabuan di Kabupaten Sorong Selatan menghadapi berbagai tantangan sosial, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta potensi konflik sosial yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan keberagaman sosial budaya masyarakat. Kondisi ini menjadikan penguatan ketahanan sosial sebagai kebutuhan mendesak yang memerlukan sinergi berbagai aktor, termasuk TNI dan pemerintah daerah (BPS Sorong Selatan, 2025; Salehuddin et al., 2023; Sarjito, 2024).

Namun demikian, kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah tidak selalu berjalan optimal karena adanya kendala koordinasi birokrasi, perbedaan kepentingan kelembagaan, serta keterbatasan sumber daya

(Muhammad Fachri Azhar et al., 2023; Rahman Hakim & Umar, 2025).

Selain dipengaruhi oleh faktor internal, ketahanan sosial masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti perubahan iklim dan globalisasi. Perubahan iklim dapat meningkatkan kerentanan sosial masyarakat di wilayah terpencil melalui terjadinya bencana alam yang merusak infrastruktur dan mengganggu mata pencaharian, sehingga menuntut respons sosial yang cepat dan terkoordinasi (Siringoringo et al., 2025). Di sisi lain, globalisasi berpotensi memengaruhi nilai-nilai sosial budaya lokal dan meningkatkan risiko terjadinya disintegrasi sosial (Hilalludin et al., 2025).

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial masyarakat di Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kolaborasi dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat setempat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Sugiyono, 2022). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, serta pengalaman sosial para aktor yang terlibat melalui data yang bersifat naratif dan kontekstual (Creswell & Clark, 2018). Sementara itu, penelitian deskriptif

digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial secara sistematis dan faktual tanpa bermaksud menguji hubungan sebab akibat antarvariabel (Sugiyono, 2022).

Penelitian dilaksanakan di Distrik Teminabuan pada Maret–April 2025, dengan informan yang dipilih secara purposive sampling (Bungin, 2018) berdasarkan tingkat keterlibatan dan pengetahuan mereka terkait kolaborasi TNI dan Pemerintah Daerah, yang meliputi unsur TNI, Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif guna menangkap realitas sosial serta interaksi antaraktor secara langsung (Moleong, 2022). Adapun data sekunder bersumber dari dokumen resmi, laporan institusi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan induktif dengan mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Kase et al., 2023). Keabsahan data dijaga melalui penerapan kriteria kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas, serta diperkuat dengan teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas dan keandalan temuan penelitian (Creswell & Clark, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pemerintah daerah merupakan strategi penting dalam memperkuat ketahanan sosial, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki dinamika sosial-politik yang kompleks seperti Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Ketahanan sosial diartikan sebagai kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai tekanan sosial, baik yang berasal dari dalam maupun luar komunitas (Hilalludin et al., 2025). Dalam konteks ini, kehadiran TNI tidak hanya diposisikan sebagai kekuatan pertahanan negara, tetapi juga sebagai aktor sosial yang turut serta dalam pembangunan masyarakat dan pemberdayaan komunitas lokal.

Kerja sama lintas sektoral antara TNI dan pemerintah daerah menjadi relevan untuk menjawab tantangan sosial, seperti kemiskinan, konflik horizontal, dan lemahnya kohesi sosial. Menurut Ritzer (2019), pendekatan fungsionalisme struktural menekankan pentingnya integrasi antar lembaga sosial untuk menciptakan stabilitas dalam masyarakat. Oleh karena itu, bentuk-bentuk kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah di Teminabuan dapat dilihat sebagai upaya institusional untuk mempertahankan keseimbangan sosial melalui program-program kemasyarakatan, pendidikan kewarganegaraan, dan ketahanan pangan yang menasar kelompok rentan di tingkat distrik.

Kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah dalam membangun ketahanan sosial di Distrik Teminabuan merupakan bentuk konkret kerja sistem sosial yang fungsional,

sebagaimana digambarkan oleh teori Talcott Parsons dalam skema AGIL. Kepala Distrik Teminabuan GS (58 tahun) menyebutkan:

Torang biasa kerja sama dengan TNI, dong datang bantu torang di kampung-kampung. Kegiatan yang torang bikin itu, misalnya pengobatan massal, edukasi kesehatan, penyuluhan juga. Torang senang, karena masyarakat bisa rasa manfaat, dan hubungan jadi lebih dekat. (Wawancara, 8 April 2025).

Pernyataan tersebut mencerminkan bentuk kolaborasi antara masyarakat dan TNI dalam kegiatan sosial. Kehadiran TNI dianggap positif karena membantu kebutuhan dasar warga, mempererat hubungan sosial, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan pendidikan di kampung-kampung. Kolaborasi ini menggambarkan fungsi adaptasi (A), di mana sistem menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang kompleks melalui koordinasi lintas sektor (Ritzer, 2015). Hal ini sejalan dengan penelitian Bustanil (2022) yang menunjukkan peran TMMD dalam meningkatkan layanan sosial dan infrastruktur di daerah terpencil, yang juga terjadi di Teminabuan. Dari sisi militer, Informan LM (57 Tahun) pada wawancara 15 April 2025 yang menyatakan:

Kami rutin mengadakan berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan kerja, program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, serta kegiatan sosial lainnya seperti bakti sosial dan edukasi masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, mendorong kemandirian ekonomi, serta memperkuat solidaritas sosial di antara warga di kampung-kampung sekitar.”

Pernyataan tersebut menunjukkan upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi. Kegiatan sosial yang dilakukan bertujuan membangun kemandirian, memperkuat solidaritas sosial, serta menciptakan perubahan positif di tingkat lokal, terutama bagi masyarakat di kampung-kampung yang membutuhkan dukung. Ini menunjukkan keterlibatan TNI dalam fungsi *goal attainment* (G), yaitu pencapaian tujuan sistem sosial dengan peran aktif dalam pembangunan masyarakat (Ritzer, 2015). Hal ini konsisten dengan temuan Saepudin Hidayat et al. , (2025) bahwa program pemberdayaan ekonomi oleh TNI dapat memperkuat solidaritas dan ketahanan sosial di daerah konflik.

Koordinasi antara instansi pemerintahan dan TNI merupakan kunci strategis dalam memperkuat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan sosial di tingkat lokal. Sinergi ini memungkinkan penggabungan sumber daya, mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat, serta menciptakan stabilitas sosial yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan. Koordinasi antara instansi pemerintahan dan TNI terlihat dari penjelasan Informan VM (48 tahun) mengatakan:

Kami membentuk tim lintas instansi di Distrik Teminabuan yang terdiri dari pemerintah distrik, TNI, aparat kampung, dan tokoh masyarakat untuk merancang program-program sosial yang sesuai dengan kebutuhan warga. Tim ini fokus pada isu-isu prioritas seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan

ekonomi masyarakat kampung. Dengan koordinasi yang baik, program-program tersebut dirancang agar tepat sasaran, menyentuh langsung persoalan di lapangan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan lokal yang berkelanjutan (wawancara 11 April 2025).

Berdasarkan wawancara diatas koordinasi lintas instansi antara pemerintah distrik, TNI, dan elemen masyarakat di Distrik Teminabuan menunjukkan sinergi yang efektif dalam merancang dan melaksanakan program-program sosial. Pendekatan ini mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat secara langsung, memperkuat partisipasi warga, serta mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan di tingkat lokal. Ini mengindikasikan fungsi integrasi (I) dalam skema AGIL, yaitu koordinasi nilai dan tindakan antar elemen sistem sosial (Ritzer, 2015). Penelitian Mardhani et al. (2020) mendukung hal ini dengan menunjukkan bahwa ketahanan sosial di perbatasan terbentuk dari kolaborasi intens antara TNI dan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan dan memperkuat identitas kebangsaan.

Partisipasi masyarakat menjadi aspek sangat penting dalam kelangsungan kolaborasi antara instansi pemerintahan dan TNI di Distrik Teminabuan. Dengan keterlibatan aktif warga, program yang dirancang menjadi lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Keterlibatan ini tidak hanya membuat kegiatan lebih tepat sasaran, tetapi

juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program yang dijalankan. Akibatnya, keberlanjutan hasil program lebih terjamin karena masyarakat merasa bertanggung jawab dan berperan aktif dalam pelaksanaannya. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat turut menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah, TNI, dan warga, sehingga pembangunan kesejahteraan dapat berjalan bersama secara sinergis.

Informan YA (53 tahun), dalam wawancara tanggal 16 April 2025, menyatakan, “Kami selalu dilibatkan dalam pertemuan dengan aparat untuk menentukan prioritas kegiatan yang sesuai dengan adat dan kebutuhan lokal.” Pernyataan ini menunjukkan bagaimana sistem sosial mempertahankan dan mengintegrasikan pola-pola nilai budaya lokal, yang menurut teori Parsons termasuk dalam fungsi latency (L) untuk menjaga stabilitas nilai dan norma dalam masyarakat (Ritzer & Stepnisky, 2017). Integrasi nilai lokal ke dalam kebijakan menjadi salah satu kekuatan pelaksanaan program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa). Sementara itu, Informan HM (42 tahun) menambahkan bahwa mereka juga melaksanakan kegiatan edukatif dan rekonsiliasi sosial guna menghindari konflik horisontal antar kelompok masyarakat (wawancara 18 April 2025).

Upaya tersebut memperkuat fungsi integrasi (I) dan latency (L) dalam masyarakat yang majemuk, sebagaimana dijelaskan oleh Ritzer (2012:437), bahwa sistem sosial membutuhkan norma bersama dan mekanisme

integrasi untuk mengurangi potensi disfungsi dan konflik sosial. Hal ini sejalan dengan temuan Miftah Faridl et al. (2020) yang menyoroti peran TNI sebagai penyeimbang dan mediator di wilayah rawan konflik sosial. Dengan demikian, kolaborasi yang melibatkan masyarakat secara aktif dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal menjadi kunci utama keberhasilan program pembangunan dan sosial di Distrik Teminabuan, menjaga kohesi sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan bersama.

Namun, tidak semua berjalan tanpa hambatan dalam pelaksanaan program kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah. Informan GS (58 tahun), dalam wawancara pada 8 April 2025, mengakui bahwa “Terkadang ada keterbatasan anggaran dan lambatnya birokrasi yang menghambat pelaksanaan program bersama.” Kondisi ini menunjukkan adanya potensi gangguan pada fungsi adaptasi (A) menurut teori Parsons, yang menekankan pentingnya efisiensi dalam adaptasi institusi terhadap perubahan dan kebutuhan lingkungan sosial agar program dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan berkelanjutan (Ritzer, 2015). Hambatan birokrasi dan pembatasan dana menjadi kendala nyata yang harus diatasi agar sinergi tetap berjalan optimal.

Selain itu, Informan LM (57 tahun), dalam wawancara pada 15 April 2025, menambahkan bahwa “Ada masyarakat yang masih curiga terhadap kegiatan kami karena trauma masa lalu.” Pernyataan ini

mencerminkan disfungsi pada fungsi integrasi (I), yang jika tidak diatasi dapat menghambat kohesi sosial dan keberhasilan program kolaborasi tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pemerintah daerah di Distrik Teminabuan merupakan strategi efektif dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Melalui kerja sama lintas sektoral, TNI tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Kolaborasi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pemerintah daerah di Distrik Teminabuan terbukti berperan penting dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Sinergi ini menempatkan TNI tidak hanya sebagai institusi pertahanan, tetapi juga sebagai aktor pembangunan sosial melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi, pelayanan sosial, dan penguatan kohesi masyarakat. Kolaborasi lintas sektor tersebut mencerminkan berfungsinya sistem sosial secara adaptif, integratif, dan berorientasi pada pencapaian tujuan bersama, meskipun masih menghadapi kendala birokrasi, keterbatasan anggaran, dan dinamika sosial masyarakat. Dengan dukungan partisipasi warga dan koordinasi yang berkelanjutan, kolaborasi TNI dan pemerintah daerah di Teminabuan menjadi strategi efektif dalam menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, P., Sitepu, B., & Maulana, R. Y. (2021). Tata Kelola Program Corporate Social Responsibility (Csr) Melalui Konsep Collaborative Governance Dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1). <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1>
- Asih, S. A., & Kurniawan, B. (2024). Upaya Pelestarian Tradisi Greoan Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Nilai Kebudayaan (Studi Kasus Di Desa Macan Putih Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(10), 7. <https://doi.org/10.17977/um063v4i10p7>
- BPS Sorong Selatan. (2025, February). Kabupaten Sorong Selatan Dalam Angka. *BPS Sorong Selatan, XVII*.
- Bungin, B. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya* (Kedua). Prenadamedia Group.
- Bustanil, Rizwan Haji Ali, M., & Zuhilmi. (2022). Peran Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). *JPP Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 7, 74–101.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2018). *Qualitative inquiry and research design* (K. DeRosa, Ed.; 3rd ed.). SAGE.
- Djuyandi, Y., Husin, L. H., Mustofa, M. U., & Iriansyah, M. N. (2023). Penguatan Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Sebagai Bentuk Pertahanan Negara: Pengalaman Dari Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat. *Dharmakarya*, 12(1), 89. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v12i1.38312>
- Hidayat, S., & Radyawanto, A. S. (2025). Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan TNI AD: Pelopor

- Ketahanan Pangan Indonesia. *JIEMAR (Journal of Industrial Engineering & Management Research)*, 6. <http://www.jiemar.org>
- Hilalludin, H., Sugari, D., Mustakfibillah, M., & Dwi Maryani, E. (2025). Peran Modal Sosial dalam Membangun Ketahanan Masyarakat pada Era Post-Pandemi. *Scinusa*, 1(2), 15–29.
- Kase, A. D., Sarwindah Sukiatni, D., Kusumandari, R., & Psikologi, F. (2023). Resiliensi remaja korban kekerasan seksual di Kabupaten Timor Tengah Selatan: Analisis Model Miles dan Huberman. *INNER: Journal of Psychological Research*, 3(2), 301–311.
- Kusendarto, K., W, H. W., & Maswir, M. (2025). Integrasi Kampung Bahari Nusantara dengan Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam Operasi Militer selain Perang. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(11), 12814–12820. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i11.9554>
- Manoppo, R. T. S., Pati, A. . , & Kimbal, A. . . (2021). Implementasi Kebijakan Bela Negara Untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional Di Wilayah Komando Distrik Militer 1309 / Manado. *Agri-Sosioekonomi*, 17(1), 103. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.1.2021.32486>
- Mardhani, D., Josias, A., Runturambi, S., & Hanita, D. M. (2020). Keamanan Dan Pertahanan Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, (3).
- Martina Marwanti, T., Rainy Sundari, N., Murni, R., Muryanto, Y., & Denti Kardeti Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, dan. (2017). Ketahanan Sosial Dalam Menghadapi Perubahan Sosial Komunitas Adat Kampung Pulo Di Kabupaten Garut. In *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* (Vol. 16, Number 2).
- Moleong, L. J. (2022). *Qualitative research methodology* (Edisi revi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Fachri Azhar, Fitri Wahyu Rhamdani, Fitri Sisca Wulandari, Adrian Gilang Pamungkas, Junior Amalia Saputri, & Aura Risqita Andiany. (2023). Kolaborasi Mahasiswa dan Masyarakat Desa dalam Mengatasi Tantangan Sosial Melalui Program KKN di Desa Pisangan Jaya. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(6), 20–47. <https://doi.org/10.54066/jikma.v1i6.1047>
- Rahman Hakim, A., & Umar, G. (2025). Model Kolaboratif Pemerintah, Masyarakat, dan Sektor Swasta dalam Mengintegrasikan Tujuan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Daerah. In *Journal of Current Research in Management* (Vol. 2, Number 1).
- Ramli, U., Hasbi, H., & Basri, L. (2022). Fungsi Perempuan dalam Mencapai Ketahanan Keluarga di Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong. *Noken*, 8(1), 111–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/jn.v8i1.2055>
- Ramli, U., Hasbi, H., & Ramli, M. A. (2022). Synergy of Sole Worker Women and Families to Achieving Family Resilience in Klamana Village East Sorong District Sorong City. In *Proceedings of the 7th Progressive and Fun Education International Conference (PROFUNEDU 2022)*. Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-71-8>
- Ramli, U., Hidayat, N., & Kamaluddin. (2023). Faktor Pendorong Resiliensi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Giwu dan Kelurahan Saoka Kota Sorong). *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 265–273.

<https://doi.org/https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.3207>

- Ritzer, G. (2015). *Teori Sosiologi Modern: Edisi 7* (7th ed.). Kencana Pradana Media Grup.
- Ritzer, G. (2019). *Sosiologi ilmu pengetahuan berparadigma ganda* (Alimandan, Ed.; 3rd ed.). PT Raja Grafindo.
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2017). *Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots: The Basics* (7th ed.). SAGE Publications Inc.
- Salehuddin, Oruh, S., Agustang, A., & Maswati, R. (2023). Inklusi Pendidikan Dan Dinamika Kebudayaan Lokal Di Papua. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6, 1413–1424. <https://doi.org/https://doi.org/10.33627/es.v6i2.1718>
- Sarjito, A. (2024). Membangun Kesatuan Bangsa melalui Pendekatan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Masyarakat Papua. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 4(1),

1–13.

<https://doi.org/10.51577/jgpi.v4i1.472>

- Siringoringo, R., Urip Wahyudin, D., Si, M., & Nurwahyuliningsih, E. (2025). Tantangan dan Strategi Penguatan Ketahanan Sosial berbasis Kearifan Lokal pada Komunitas Adat Terpencil Suku Asmat. In *Jurnal Sosio Informa* (Vol. 11, Number 2).
- Sugiyono. (2022). *Qualitative Research Methods* (Sofia Yustiyani Suryandari, Ed.; IV). Alfabeta.
- Widhagdha, M. F., & Hidayat, R. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi Resolusi Konflik Sosial. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8, 82–91.

PROFIL SINGKAT

Penulis bernama Nimbort Duwit, mahasiswa Sarjana Sosiologi pada tahun 2023 dengan jalur RPL FISIP Universitas Muhammadiyah Sorong. Saat ini bertugas di Dandim Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan